



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-1.HN.03.08 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2021**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu memberikan penilaian kinerja kepada pengelola yang telah melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan inovasi di dalam pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan dokumen laporan pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, telah tersusun Daftar Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2021.**

KESATU...

- KESATU : Penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan terhadap Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah memiliki laman (*website*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Tahun 2021.
- KEDUA : Menetapkan kategori atau peringkat kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan hasil penilaian kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan tidak dapat diganggu gugat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada setiap penerima penghargaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Para Menteri Kabinet Kerja terkait;
3. Para Pimpinan Lembaga Negara terkait;
4. Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian terkait;
5. Para Pimpinan Lembaga Non-Struktural terkait;
6. Para Gubernur terkait;
7. Para Bupati terkait;
8. Para Walikota terkait;
9. Para Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota terkait;
10. Para Rektor Universitas terkait.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-1.HN.03.08 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 September 2022

**PENGERTIAN TINGKAT PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2021**

Nilai tertinggi yang diperoleh dari keseluruhan aspek pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah 100 (seratus). Adapun peringkat atau kategori yang digunakan sebagai hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH untuk periode Tahun 2021 terbagi atas:

1. Kategori CATUR DANDANI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Catur*" = Empat dan "*Dandan*" = Mempersiapkan. Dengan demikian kategori *Catur Dandani* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang masih dalam tahap persiapan. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIH yang memperoleh penilaian antara 0 s.d. 25;

2. Kategori TRI BUNTARA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Tri*" = Tiga dan "*Buntara*" = Bersemangat, dengan demikian kategori *Tri Buntara* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang sedang bersemangat untuk menuju pengelolaan JDIH yang lebih baik. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 26 s.d. 50;

3. Kategori DWI TUNGGGA

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu, "*Dwi*" = Dua dan "*Tungga*" = Tinggi. Dengan demikian kategori *Dwi Tungga* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 51 s.d. 75;

4. Kategori EKA ACALAPATI

Penamaan kategori ini diambil dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti yaitu "*Eka*" = Pertama dan "*Acalapati*" = Paling Tinggi. Dengan demikian kategori *Eka Acalapati* dalam penilaian Anggota JDIHN dapat diartikan sebagai Anggota JDIHN yang bernilai paling tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi Anggota JDIHN lainnya. Anggota JDIHN dengan kategori ini adalah Anggota JDIHN yang memperoleh hasil penilaian antara 76 s.d. 100.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-1.HN.03.08 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 September 2022

**HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGLOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TAHUN 2021**

I. KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	97
2.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	95
3.	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	94
4.	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	92
5.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	91
6.	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	90
7.	Kementerian Sosial Republik Indonesia	90
8.	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	89
9.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	88
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	86
11.	Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal	85
12.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	85
13.	Kementerian Agama Republik Indonesia	84
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	83
15.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	82
16.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	82
17.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	81
18.	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	81
19.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	80
20.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	79

No.	Nama Instansi	Nilai
21.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
22.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia	74
23.	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	73
24.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	73
25.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	72
26.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	70
27.	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	69
28.	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	68
29.	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	65
30.	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	64
31.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	61
32.	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	61
33.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	60

II. LEMBAGA NEGARA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	93
2.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	88
3.	Ombudsman Republik Indonesia	84
4.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	80
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
5.	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	74
6.	Mahkamah Agung Republik Indonesia	72
7.	Komisi Yudisial	62
8.	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	61
9.	Komisi Pemberantasan Korupsi	60

III. LEMBAGA NON-STRUKTURAL

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	92
2.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	86
3.	Komisi Aparatur Sipil Negara	84
4.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	83
5.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	79
6.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Republik Indonesia	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
7.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	74
8.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	70
9.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	64
10.	Dewan Ketahanan Nasional	62
11.	Komisi Informasi Pusat	59
12.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	55
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
13.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	40
14.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	34
15.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	55

IV. LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	92
2.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	90
3.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	89
4.	Perpustakaan Nasional	86
5.	Arsip Nasional Republik Indonesia	83
6.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	83
7.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	82
8.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	82

No.	Nama Instansi	Nilai
9.	Badan Informasi Geospasial	78
10.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	78
11.	Radio Republik Indonesia	78
12.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
13.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	75
14.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	75
15.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	74
16.	Kejaksaan Agung	74
17.	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	72
18.	Badan Siber dan Sandi Negara	67
19.	Tentara Nasional Indonesia	66
20.	Lembaga Administrasi Negara	65
21.	Badan Narkotika Nasional	64
22.	Badan Kepegawaian Negara	63
23.	Badan Pusat Statistik	63
24.	Badan Standardisasi Nasional	63
25.	Televisi Republik Indonesia	62
26.	Badan Intelijen Negara	54
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
27.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	34
28.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	34
29.	Sekretariat Kabinet	33

V. PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Provinsi Bali	93
2.	Provinsi Jawa Tengah	92
3.	Provinsi Jawa Barat	87
4.	Provinsi Jawa Timur	85
5.	Provinsi Kalimantan Timur	84

No.	Nama Instansi	Nilai
6.	Provinsi Bengkulu	83
7.	Provinsi Sulawesi Barat	83
8.	Provinsi DKI Jakarta	82
9.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	81
10.	Provinsi Riau	80
11.	Provinsi Kalimantan Selatan	78
12.	Provinsi Sumatera Utara	78
13.	Provinsi Maluku	76
14.	Provinsi Sulawesi Selatan	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
15.	Provinsi Sumatera Barat	75
16.	Provinsi Kalimantan Utara	74
17.	Provinsi Kalimantan Tengah	73
18.	Provinsi Sulawesi Tengah	73
19.	Provinsi Gorontalo	71
20.	Provinsi Sumatera Selatan	71
21.	Provinsi Aceh	70
22.	Provinsi Jambi	70
23.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70
24.	Provinsi Kepulauan Riau	70
25.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	70
26.	Provinsi Maluku Utara	69
27.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	68
28.	Provinsi Lampung	66
29.	Provinsi Papua Barat	64
30.	Provinsi Banten	63
31.	Provinsi Sulawesi Tenggara	62
32.	Provinsi Kalimantan Barat	61
33.	Provinsi Papua	61
34.	Provinsi Sulawesi Utara	58

VI. KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d 100)			
1.	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	99
2.	Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	96
3.	Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	95
4.	Kabupaten Batang	Jawa Tengah	94
5.	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	94
6.	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	92
7.	Kabupaten Blora	Jawa Tengah	91
8.	Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah	91
9.	Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	90
10.	Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	90
11.	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	88
12.	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	88
13.	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	87
14.	Kabupaten Garut	Jawa Barat	87
15.	Kabupaten Gianyar	Bali	87
16.	Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	86
17.	Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	86
18.	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	85
19.	Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	85
20.	Kabupaten Tuban	Jawa Timur	85
21.	Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	84
22.	Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	83
23.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	83
24.	Kabupaten Klungkung	Bali	83
25.	Kabupaten Pati	Jawa Tengah	83
26.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	82
27.	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	82
28.	Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	82
29.	Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	82
30.	Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	82
31.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	81

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
32.	Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	81
33.	Kabupaten Batanghari	Jambi	81
34.	Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	81
35.	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	81
36.	Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	81
37.	Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	81
38.	Kabupaten Seram Bagian Timur	Maluku	81
39.	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	81
40.	Kabupaten Gresik	Jawa Timur	80
41.	Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	80
42.	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	80
43.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	80
44.	Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	79
45.	Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	79
46.	Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	79
47.	Kabupaten Demak	Jawa Tengah	79
48.	Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	78
49.	Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	78
50.	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	78
51.	Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	78
52.	Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	78
53.	Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	77
54.	Kabupaten Badung	Bali	77
55.	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	77
56.	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	77
57.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	77
58.	Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	77
59.	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	77
60.	Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	77
61.	Kabupaten Madiun	Jawa Timur	77
62.	Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	77
63.	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	77
64.	Kabupaten Bangli	Bali	76

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
65.	Kabupaten Blitar	Jawa Timur	76
66.	Kabupaten Buleleng	Bali	76
67.	Kabupaten Jembrana	Bali	76
68.	Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	76
69.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	76
70.	Kabupaten Kerinci	Jambi	76
71.	Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	76
72.	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	76
73.	Kabupaten Sarolangun	Jambi	76
74.	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	75
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
75.	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	75
76.	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	75
77.	Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	75
78.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	75
79.	Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	75
80.	Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	75
81.	Kabupaten Lampung Timur	Lampung	75
82.	Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	75
83.	Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	75
84.	Kabupaten Siak	Riau	75
85.	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	74
86.	Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	74
87.	Kabupaten Pandeglang	Banten	74
88.	Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	74
89.	Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	74
90.	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	74
91.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	74
92.	Kabupaten Toli Toli	Sulawesi Tengah	74
93.	Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	73
94.	Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	73
95.	Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	73
96.	Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	73

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
97.	Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	73
98.	Kabupaten Lebong	Bengkulu	73
99.	Kabupaten Sampang	Jawa Timur	73
100.	Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	73
101.	Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	73
102.	Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	73
103.	Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	72
104.	Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	72
105.	Kabupaten Karangasem	Bali	72
106.	Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	72
107.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	72
108.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	72
109.	Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	72
110.	Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	72
111.	Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	72
112.	Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	72
113.	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	72
114.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	72
115.	Kabupaten Rokan Hilir	Riau	72
116.	Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara	72
117.	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	72
118.	Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	71
119.	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	71
120.	Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	71
121.	Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	71
122.	Kabupaten Bangka	Kepulauan Bangka Belitung	70
123.	Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	70
124.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	70
125.	Kabupaten Kampar	Riau	70
126.	Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	70
127.	Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	70
128.	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	70
129.	Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	70

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
130.	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat	70
131.	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	70
132.	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	70
133.	Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	70
134.	Kabupaten Gayo Lues	Aceh	69
135.	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	69
136.	Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	69
137.	Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	69
138.	Kabupaten Serang	Banten	69
139.	Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	69
140.	Kabupaten Tabanan	Bali	69
141.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	69
142.	Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	69
143.	Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	68
144.	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	68
145.	Kabupaten Bengkalis	Riau	68
146.	Kabupaten Biak Numfor	Papua	68
147.	Kabupaten Bireuen	Aceh	68
148.	Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	68
149.	Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	68
150.	Kabupaten Seluma	Bengkulu	68
151.	Kabupaten Tebo	Jambi	68
152.	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	68
153.	Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	67
154.	Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	67
155.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	67
156.	Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	67
157.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	67
158.	Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	66
159.	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	66
160.	Kabupaten Lebak	Banten	66
161.	Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	66
162.	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	66

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
163.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	65
164.	Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	65
165.	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	65
166.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	65
167.	Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	65
168.	Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	65
169.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	65
170.	Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	65
171.	Kabupaten Simeulue	Aceh	65
172.	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	65
173.	Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	65
174.	Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	64
175.	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	64
176.	Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	64
177.	Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	64
178.	Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	64
179.	Kabupaten Magetan	Jawa Timur	64
180.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	64
181.	Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	64
182.	Kabupaten Pesawaran	Lampung	64
183.	Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku	64
184.	Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	64
185.	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat	64
186.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	64
187.	Kabupaten Aceh Timur	Aceh	63
188.	Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	63
189.	Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	63
190.	Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	63
191.	Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	63
192.	Kabupaten Muko Muko	Bengkulu	63
193.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	63
194.	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	63
195.	Kabupaten Pringsewu	Lampung	63

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
196.	Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	63
197.	Kabupaten Sorong	Papua Barat	63
198.	Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	63
199.	Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	62
200.	Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	62
201.	Kabupaten Bener Meriah	Aceh	62
202.	Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	62
203.	Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	62
204.	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	62
205.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	62
206.	Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	62
207.	Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	62
208.	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	62
209.	Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	62
210.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	62
211.	Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	62
212.	Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	62
213.	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu	62
214.	Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	62
215.	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	62
216.	Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	62
217.	Kabupaten Way Kanan	Lampung	62
218.	Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	62
219.	Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	61
220.	Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	61
221.	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	61
222.	Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	61
223.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	61
224.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	61
225.	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	61
226.	Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	61
227.	Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	61
228.	Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	61

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
229.	Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	61
230.	Kabupaten Mesuji	Lampung	61
231.	Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	61
232.	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	61
233.	Kabupaten Pidie	Aceh	61
234.	Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	61
235.	Kabupaten Tanggamus	Lampung	61
236.	Kabupaten Aceh Barat	Aceh	60
237.	Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	60
238.	Kabupaten Aceh Besar	Aceh	60
239.	Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	60
240.	Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	60
241.	Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	60
242.	Kabupaten Buru Selatan	Maluku	60
243.	Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	60
244.	Kabupaten Jayapura	Papua	60
245.	Kabupaten Jayawijaya	Papua	60
246.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	60
247.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	60
248.	Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	60
249.	Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan	60
250.	Kabupaten Lampung Barat	Lampung	60
251.	Kabupaten Lampung Utara	Lampung	60
252.	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	60
253.	Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	60
254.	Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	60
255.	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	60
256.	Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	60
257.	Kabupaten Subang	Jawa Barat	60
258.	Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	60
259.	Kabupaten Aceh Utara	Aceh	59
260.	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	59
261.	Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	59

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
262.	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	59
263.	Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	59
264.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	59
265.	Kabupaten Jember	Jawa Timur	59
266.	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	59
267.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	59
268.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	59
269.	Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	59
270.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	59
271.	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	58
272.	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	58
273.	Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	58
274.	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	58
275.	Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	58
276.	Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	58
277.	Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	58
278.	Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur	58
279.	Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	58
280.	Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	58
281.	Kabupaten Tangerang	Banten	58
282.	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	58
283.	Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	58
284.	Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	57
285.	Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	57
286.	Kabupaten Fak Fak	Papua Barat	57
287.	Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	57
288.	Kabupaten Malang	Jawa Timur	57
289.	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	57
290.	Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	57
291.	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	57
292.	Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	56
293.	Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	56
294.	Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	56

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
295.	Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur	56
296.	Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	56
297.	Kabupaten Pelalawan	Riau	56
298.	Kabupaten Rokan Hulu	Riau	56
299.	Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	56
300.	Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	56
301.	Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	55
302.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	55
303.	Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	55
304.	Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	55
305.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	54
306.	Kabupaten Buru	Maluku	54
307.	Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	54
308.	Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	54
309.	Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	54
310.	Kabupaten Boalemo	Gorontalo	53
311.	Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku	53
312.	Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	53
313.	Kabupaten Kaur	Bengkulu	52
314.	Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur	52
315.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	52
316.	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	52
317.	Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	52
318.	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
319.	Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	50
320.	Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	50
321.	Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	50
322.	Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	50
323.	Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	50
324.	Kabupaten Bungo	Jambi	50
325.	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	50
326.	Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	50

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
327.	Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	50
328.	Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	50
329.	Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	50
330.	Kabupaten Merauke	Papua	50
331.	Kabupaten Mimika	Papua	50
332.	Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	50
333.	Kabupaten Minahasa Tenggara	Sulawesi Utara	50
334.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	50
335.	Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	50
336.	Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	50
337.	Kabupaten Halmahera Timur	Maluku Utara	46
338.	Kabupaten Halmahera Selatan	Maluku Utara	45
339.	Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara	45
340.	Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	44
341.	Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara	44
342.	Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	44
343.	Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	44
344.	Kabupaten Muna Barat	Sulawesi Tenggara	44
345.	Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	44
346.	Kabupaten Intan Jaya	Papua	43
347.	Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	43
348.	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	43
349.	Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	42
350.	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	42
351.	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	42
352.	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	42
353.	Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	42
354.	Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	41
355.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	41
356.	Kabupaten Pahuwato	Gorontalo	41
357.	Kabupaten Paniai	Papua	41
358.	Kabupaten Pulau Taliabu	Maluku Utara	41
359.	Kabupaten Puncak Jaya	Papua	41

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
360.	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat	41
361.	Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	41
362.	Kabupaten Sarmi	Papua	41
363.	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	41
364.	Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	40
365.	Kabupaten Boven Digoel	Papua	40
366.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Maluku	40
367.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua	40
368.	Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	40
369.	Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur	40
370.	Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	40
371.	Kabupaten Manokwari	Papua Barat	40
372.	Kabupaten Yahukimo	Papua	40
373.	Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	39
374.	Kabupaten Kaimana	Papua Barat	39
375.	Kabupaten Karo	Sumatera Utara	39
376.	Kabupaten Keerom	Papua	39
377.	Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	39
378.	Kabupaten Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	39
379.	Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	39
380.	Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	39
381.	Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara	39
382.	Kabupaten Lanny Jaya	Papua	39
383.	Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	39
384.	Kabupaten Merangin	Jambi	39
385.	Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	39
386.	Kabupaten Nias	Sumatera Utara	39
387.	Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	39
388.	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan	39
389.	Kabupaten Tolikara	Papua	39
390.	Kabupaten Waropen	Papua	39
391.	Kabupaten Deiyai	Papua	38
392.	Kabupaten Dogiyai	Papua	38

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
393.	Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	38
394.	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	38
395.	Kabupaten Mamberamo Raya	Papua	38
396.	Kabupaten Mappi	Papua	38
397.	Kabupaten Maybrat	Papua Barat	38
398.	Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	38
399.	Kabupaten Supiori	Papua	38
400.	Kabupaten Tambrauw	Papua Barat	38
401.	Kabupaten Yalimo	Papua	38
402.	Kabupaten Asmat	Papua	37
403.	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	37
404.	Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur	37
405.	Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	37
406.	Kabupaten Nabire	Papua	37
407.	Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	37
408.	Kabupaten Pegunungan Arfak	Papua Barat	36
409.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Papua	36
410.	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	36
411.	Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	35
412.	Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	35
Kategori CATUR DANDANI (Nilai 0 s.d. 25)			
413.	Kabupaten Toba	Sumatera Utara	25

VII. KOTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Kota Batam	Kepulauan Riau	90
2.	Kota Bogor	Jawa Barat	88
3.	Kota Ambon	Maluku	87
4.	Kota Sukabumi	Jawa Barat	87
5.	Kota Bandung	Jawa Barat	86
6.	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	86
7.	Kota Surakarta	Jawa Tengah	86

No.	Nama Instansi		Nilai
8.	Kota Bekasi	Jawa Barat	85
9.	Kota Cirebon	Jawa Barat	85
10.	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	84
11.	Kota Tangerang	Banten	84
12.	Kota Palembang	Sumatera Selatan	83
13.	Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	82
14.	Kota Metro	Lampung	82
15.	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	82
16.	Kota Sungai Penuh	Jambi	82
17.	Kota Tangerang Selatan	Banten	82
18.	Kota Pekanbaru	Riau	81
19.	Kota Semarang	Jawa Tengah	81
20.	Kota Sorong	Papua Barat	80
21.	Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	79
22.	Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	79
23.	Kota Pariaman	Sumatera Barat	78
24.	Kota Probolinggo	Jawa Timur	78
25.	Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	77
26.	Kota Denpasar	Bali	77
27.	Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	77
28.	Kota Madiun	Jawa Timur	76
29.	Kota Magelang	Jawa Tengah	76
30.	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
31.	Kota Banjar	Jawa Barat	74
32.	Kota Jambi	Jambi	74
33.	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	74
34.	Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	74
35.	Kota Serang	Banten	74
36.	Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	74
37.	Kota Tegal	Jawa Tengah	74
38.	Kota Batu	Jawa Timur	73
39.	Kota Bontang	Kalimantan Timur	73

No.	Nama Instansi		Nilai
40.	Kota Solok	Sumatera Barat	73
41.	Kota Surabaya	Jawa Timur	73
42.	Kota Bitung	Sulawesi Utara	72
43.	Kota Malang	Jawa Timur	72
44.	Kota Padang	Sumatera Barat	72
45.	Kota Tarakan	Kalimantan Utara	72
46.	Kota Cilegon	Banten	71
47.	Kota Salatiga	Jawa Tengah	71
48.	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	70
49.	Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	70
50.	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	70
51.	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	70
52.	Kota Bengkulu	Bengkulu	69
53.	Kota Depok	Jawa Barat	69
54.	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta	69
55.	Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	68
56.	Kota Banda Aceh	Aceh	67
57.	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta	67
58.	Kota Blitar	Jawa Timur	66
59.	Kota Jakarta Barat	DKI Jakarta	66
60.	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta	66
61.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	65
62.	Kota Subulussalam	Aceh	65
63.	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	64
64.	Kota Samarinda	Kalimantan Timur	64
65.	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	63
66.	Kota Sibolga	Sumatera Utara	63
67.	Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	63
68.	Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	63
69.	Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	62
70.	Kota Langsa	Aceh	62
71.	Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	62
72.	Kota Palopo	Sulawesi Selatan	62

No.	Nama Instansi		Nilai
73.	Kota Manado	Sulawesi Utara	61
74.	Kota Palu	Sulawesi Tengah	61
75.	Kota Sabang	Aceh	61
76.	Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	61
77.	Kota Binjai	Sumatera Utara	60
78.	Kota Gorontalo	Gorontalo	60
79.	Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	60
80.	Kota Pasuruan	Jawa Timur	60
81.	Kota Ternate	Maluku Utara	60
82.	Kota Bandar Lampung	Lampung	59
83.	Kota Lhokseumawe	Aceh	59
84.	Kota Medan	Sumatera Utara	59
85.	Kota Tomohon	Sulawesi Utara	59
86.	Kota Makassar	Sulawesi Selatan	58
87.	Kota Mojokerto	Jawa Timur	58
88.	Kota Sawahlunto	Sumatera Barat	56
89.	Kota Singkawang	Kalimantan Barat	56
90.	Kota Kediri	Jawa Timur	55
91.	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	55
92.	Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	53
93.	Kota Dumai	Riau	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
94.	Kota Cimahi	Jawa Barat	46
95.	Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	42
96.	Kota Tual	Maluku	40
97.	Kota Jayapura	Papua	37
98.	Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	30

VIII. DPRD PROVINSI

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	DPRD Provinsi Lampung	85
2.	DPRD Provinsi Jawa Tengah	80
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
3.	DPRD Provinsi Bali	72
4.	DPRD Provinsi DKI Jakarta	63
5.	DPRD Provinsi Aceh	62
6.	DPRD Provinsi Sumatera Barat	62
7.	DPRD Provinsi Riau	60
8.	DPRD Provinsi Jawa Timur	58
9.	DPRD Provinsi Sulawesi Barat	58
10.	DPRD Provinsi Kepulauan Riau	57
11.	DPRD Provinsi Jawa Barat	56
12.	DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	55
13.	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	53
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)		
14.	DPRD Provinsi Banten	48
15.	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	46
16.	DPRD Provinsi Maluku	41
17.	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	41
18.	DPRD Provinsi Papua	41
19.	DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	41
20.	DPRD Provinsi Sumatera Selatan	40
21.	DPRD Provinsi Kalimantan Barat	39
22.	DPRD Provinsi Sumatera Utara	39
23.	DPRD Provinsi Jambi	38
24.	DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	38
25.	DPRD Provinsi Kalimantan Utara	38
26.	DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	38
27.	DPRD Provinsi Maluku Utara	38
28.	DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat	38
29.	DPRD Provinsi Papua Barat	38
30.	DPRD Provinsi Gorontalo	37

No.	Nama Instansi	Nilai
31.	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	37
32.	DPRD Provinsi Sulawesi Utara	37

IX. DPRD KABUPATEN

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kabupaten Batang	Jawa Tengah	85
2.	DPRD Kabupaten Pangandaran	Jawa Barat	82
3.	DPRD Kabupaten Sumedang	Jawa Barat	81
4.	DPRD Kabupaten Buleleng	Bali	79
5.	DPRD Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	79
6.	DPRD Kabupaten Bungo	Jambi	77
7.	DPRD Kabupaten Subang	Jawa Barat	77
8.	DPRD Kabupaten Brebes	Jawa Tengah	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
9.	DPRD Kabupaten Batu bara	Sumatera Utara	75
10.	DPRD Kabupaten Bireuen	Aceh	75
11.	DPRD Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh	72
12.	DPRD Kabupaten Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	72
13.	DPRD Kabupaten Batang Hari	Jambi	71
14.	DPRD Kabupaten Ciamis	Jawa Barat	71
15.	DPRD Kabupaten Sarolangun	Jambi	71
16.	DPRD Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung	70
17.	DPRD Kabupaten Paser	Kalimantan Timur	70
18.	DPRD Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah	70
19.	DPRD Kabupaten Sragen	Jawa Tengah	70
20.	DPRD Kabupaten Tabalong	Kalimantan Selatan	70
21.	DPRD Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	69
22.	DPRD Kabupaten Garut	Jawa Barat	69
23.	DPRD Kabupaten Seruyan	Kalimantan Tengah	69
24.	DPRD Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	69
25.	DPRD Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah	69

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
26.	DPRD Kabupaten Tabanan	Bali	69
27.	DPRD Kabupaten Demak	Jawa Tengah	68
28.	DPRD Kabupaten Jembrana	Bali	68
29.	DPRD Kabupaten Karangasem	Bali	68
30.	DPRD Kabupaten Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	66
31.	DPRD Kabupaten Sukamara	Kalimantan Tengah	66
32.	DPRD Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat	66
33.	DPRD Kabupaten Aceh Singkil	Aceh	65
34.	DPRD Kabupaten Bangli	Bali	65
35.	DPRD Kabupaten Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	65
36.	DPRD Kabupaten Rokan Hilir	Riau	65
37.	DPRD Kabupaten Seluma	Bengkulu	64
38.	DPRD Kabupaten Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	63
39.	DPRD Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	63
40.	DPRD Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	63
41.	DPRD Kabupaten Simeulue	Aceh	63
42.	DPRD Kabupaten Tegal	Jawa Tengah	63
43.	DPRD Kabupaten Bener Meriah	Aceh	62
44.	DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau	62
45.	DPRD Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	62
46.	DPRD Kabupaten Wonogiri	Jawa Tengah	62
47.	DPRD Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	61
48.	DPRD Kabupaten Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	61
49.	DPRD Kabupaten Bantul	Daerah Istimewa Yogyakarta	61
50.	DPRD Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan	61
51.	DPRD Kabupaten Cilacap	Jawa Tengah	61
52.	DPRD Kabupaten Cirebon	Jawa Barat	61
53.	DPRD Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	61
54.	DPRD Kabupaten Kotabaru	Kalimantan Selatan	61
55.	DPRD Kabupaten Kudus	Jawa Tengah	61
56.	DPRD Kabupaten Kuningan	Jawa Barat	61
57.	DPRD Kabupaten Lampung Tengah	Lampung	61
58.	DPRD Kabupaten Nganjuk	Jawa Timur	61

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
59.	DPRD Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	61
60.	DPRD Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara	61
61.	DPRD Kabupaten Pacitan	Jawa Timur	61
62.	DPRD Kabupaten Pakpak Bharat	Sumatera Utara	61
63.	DPRD Kabupaten Pamekasan	Jawa Timur	61
64.	DPRD Kabupaten Pati	Jawa Tengah	61
65.	DPRD Kabupaten Serdang Bedagai	Sumatera Utara	61
66.	DPRD Kabupaten Bangka Tengah	Kepulauan Bangka Belitung	60
67.	DPRD Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	60
68.	DPRD Kabupaten Bondowoso	Jawa Timur	60
69.	DPRD Kabupaten Buru Selatan	Maluku	60
70.	DPRD Kabupaten Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	60
71.	DPRD Kabupaten Mesuji	Lampung	60
72.	DPRD Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan	60
73.	DPRD Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	60
74.	DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya	Aceh	59
75.	DPRD Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh	59
76.	DPRD Kabupaten Bangkalan	Jawa Timur	59
77.	DPRD Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah	59
78.	DPRD Kabupaten Banyuasin	Sumatera Selatan	59
79.	DPRD Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	59
80.	DPRD Kabupaten Bima	Nusa Tenggara Barat	59
81.	DPRD Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur	59
82.	DPRD Kabupaten Jember	Jawa Timur	59
83.	DPRD Kabupaten Jombang	Jawa Timur	59
84.	DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	59
85.	DPRD Kabupaten Kulon Progo	Daerah Istimewa Yogyakarta	59
86.	DPRD Kabupaten Sampang	Jawa Timur	59
87.	DPRD Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	59
88.	DPRD Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat	59
89.	DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Jambi	59
90.	DPRD Kabupaten Trenggalek	Jawa Timur	59
91.	DPRD Kabupaten Tuban	Jawa Timur	59

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
92.	DPRD Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	59
93.	DPRD Kabupaten Way Kanan	Lampung	59
94.	DPRD Kabupaten Wonosobo	Jawa Tengah	59
95.	DPRD Kabupaten Aceh Barat	Aceh	58
96.	DPRD Kabupaten Aceh Besar	Aceh	58
97.	DPRD Kabupaten Aceh Jaya	Aceh	58
98.	DPRD Kabupaten Aceh Selatan	Aceh	58
99.	DPRD Kabupaten Aceh Tengah	Aceh	58
100.	DPRD Kabupaten Aceh Timur	Aceh	58
101.	DPRD Kabupaten Aceh Utara	Aceh	58
102.	DPRD Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	58
103.	DPRD Kabupaten Bintan	Kepulauan Riau	58
104.	DPRD Kabupaten Blitar	Jawa Timur	58
105.	DPRD Kabupaten Blora	Jawa Tengah	58
106.	DPRD Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat	58
107.	DPRD Kabupaten Gresik	Jawa Timur	58
108.	DPRD Kabupaten Kerinci	Jambi	58
109.	DPRD Kabupaten Kuantan Singingi	Riau	58
110.	DPRD Kabupaten Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat	58
111.	DPRD Kabupaten Madiun	Jawa Timur	58
112.	DPRD Kabupaten Magetan	Jawa Timur	58
113.	DPRD Kabupaten Majalengka	Jawa Barat	58
114.	DPRD Kabupaten Ogan Ilir	Sumatera Selatan	58
115.	DPRD Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	58
116.	DPRD Kabupaten Pidie	Aceh	58
117.	DPRD Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	58
118.	DPRD Kabupaten Purbalingga	Jawa Tengah	58
119.	DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	58
120.	DPRD Kabupaten Tapin	Kalimantan Selatan	58
121.	DPRD Kabupaten Toli Toli	Sulawesi Tengah	58
122.	DPRD Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan	57
123.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	57
124.	DPRD Kabupaten Kebumen	Jawa Tengah	57

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
125.	DPRD Kabupaten Kediri	Jawa Timur	57
126.	DPRD Kabupaten Lampung Barat	Lampung	57
127.	DPRD Kabupaten Lingga	Kepulauan Riau	57
128.	DPRD Kabupaten Malang	Jawa Timur	57
129.	DPRD Kabupaten Mojokerto	Jawa Timur	57
130.	DPRD Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan	57
131.	DPRD Kabupaten Murung Raya	Kalimantan Tengah	57
132.	DPRD Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan	57
133.	DPRD Kabupaten Pidie Jaya	Aceh	57
134.	DPRD Kabupaten Ponorogo	Jawa Timur	57
135.	DPRD Kabupaten Pringsewu	Lampung	57
136.	DPRD Kabupaten Bengkalis	Riau	56
137.	DPRD Kabupaten Empat Lawang	Sumatera Selatan	56
138.	DPRD Kabupaten Gayo Lues	Aceh	56
139.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	56
140.	DPRD Kabupaten Rokan Hulu	Riau	56
141.	DPRD Kabupaten Asahan	Sumatera Utara	55
142.	DPRD Kabupaten Grobogan	Jawa Tengah	55
143.	DPRD Kabupaten Lumajang	Jawa Timur	55
144.	DPRD Kabupaten Bulungan	Kalimantan Utara	54
145.	DPRD Kabupaten Karawang	Jawa Barat	54
146.	DPRD Kabupaten Kepahiang	Bengkulu	54
147.	DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau	54
148.	DPRD Kabupaten Lamongan	Jawa Timur	54
149.	DPRD Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan	54
150.	DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kalimantan Selatan	52
151.	DPRD Kabupaten Lampung Utara	Lampung	51
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
152.	DPRD Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	50
153.	DPRD Kabupaten Bengkulu Utara	Bengkulu	50
154.	DPRD Kabupaten Bogor	Jawa Barat	50
155.	DPRD Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah	50
156.	DPRD Kabupaten Fak Fak	Papua Barat	50

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
157.	DPRD Kabupaten Gianyar	Bali	50
158.	DPRD Kabupaten Nagan Raya	Aceh	50
159.	DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara	Sumatera Utara	50
160.	DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Sulawesi Selatan	50
161.	DPRD Kabupaten Pesawaran	Lampung	50
162.	DPRD Kabupaten Pesisir Barat	Lampung	50
163.	DPRD Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah	50
164.	DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung	50
165.	DPRD Kabupaten Gunung Mas	Kalimantan Tengah	49
166.	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	48
167.	DPRD Kabupaten Morowali	Sulawesi Tengah	48
168.	DPRD Kabupaten Indragiri Hulu	Riau	47
169.	DPRD Kabupaten Lebak	Banten	47
170.	DPRD Kabupaten Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	46
171.	DPRD Kabupaten Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	46
172.	DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu	45
173.	DPRD Kabupaten Buol	Sulawesi Tengah	45
174.	DPRD Kabupaten Halmahera Selatan	Maluku Utara	45
175.	DPRD Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah	44
176.	DPRD Kabupaten Pulau Morotai	Maluku Utara	44
177.	DPRD Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta	44
178.	DPRD Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat	43
179.	DPRD Kabupaten Sorong	Papua Barat	43
180.	DPRD Kabupaten Sumbawa Barat	Nusa Tenggara Barat	43
181.	DPRD Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	42
182.	DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang	Sulawesi Selatan	42
183.	DPRD Kabupaten Barito Utara	Kalimantan Tengah	41
184.	DPRD Kabupaten Barru	Sulawesi Selatan	41
185.	DPRD Kabupaten Belu	Nusa Tenggara Timur	41
186.	DPRD Kabupaten Bengkayang	Kalimantan Barat	41
187.	DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu	41
188.	DPRD Kabupaten Berau	Kalimantan Timur	41
189.	DPRD Kabupaten Biak Numfor	Papua	41

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
190.	DPRD Kabupaten Boalemo	Gorontalo	41
191.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	41
192.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara	41
193.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara	41
194.	DPRD Kabupaten Dairi	Sumatera Utara	41
195.	DPRD Kabupaten Deli Serdang	Sumatera Utara	41
196.	DPRD Kabupaten Dompu	Nusa Tenggara Barat	41
197.	DPRD Kabupaten Donggala	Sulawesi Tengah	41
198.	DPRD Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur	41
199.	DPRD Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan	41
200.	DPRD Kabupaten Gorontalo	Gorontalo	41
201.	DPRD Kabupaten Gorontalo Utara	Gorontalo	41
202.	DPRD Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	41
203.	DPRD Kabupaten Halmahera Tengah	Maluku Utara	41
204.	DPRD Kabupaten Halmahera Utara	Maluku Utara	41
205.	DPRD Kabupaten Langkat	Sumatera Utara	41
206.	DPRD Kabupaten Lanny Jaya	Papua	41
207.	DPRD Kabupaten Nduga	Papua	41
208.	DPRD Kabupaten Nias	Sumatera Utara	41
209.	DPRD Kabupaten Nias Barat	Sumatera Utara	41
210.	DPRD Kabupaten Nias Selatan	Sumatera Utara	41
211.	DPRD Kabupaten Nias Utara	Sumatera Utara	41
212.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	41
213.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sumatera Selatan	41
214.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan	41
215.	DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Sumatera Selatan	41
216.	DPRD Kabupaten Padang Lawas	Sumatera Utara	41
217.	DPRD Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	41
218.	DPRD Kabupaten Pandeglang	Banten	41
219.	DPRD Kabupaten Pulau Taliabu	Maluku Utara	41
220.	DPRD Kabupaten Puncak	Papua	41

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
221.	DPRD Kabupaten Purworejo	Jawa Tengah	41
222.	DPRD Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu	41
223.	DPRD Kabupaten Rembang	Jawa Tengah	41
224.	DPRD Kabupaten Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	41
225.	DPRD Kabupaten Sabu Raijua	Nusa Tenggara Timur	41
226.	DPRD Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat	41
227.	DPRD Kabupaten Samosir	Sumatera Utara	41
228.	DPRD Kabupaten Sekadau	Kalimantan Barat	41
229.	DPRD Kabupaten Semarang	Jawa Tengah	41
230.	DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat	Maluku	41
231.	DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur	Maluku	41
232.	DPRD Kabupaten Serang	Banten	41
233.	DPRD Kabupaten Solok	Sumatera Barat	41
234.	DPRD Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	41
235.	DPRD Kabupaten Sumba Barat	Nusa Tenggara Timur	41
236.	DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	41
237.	DPRD Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur	41
238.	DPRD Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur	41
239.	DPRD Kabupaten Barito Selatan	Kalimantan Tengah	40
240.	DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Sulawesi Utara	40
241.	DPRD Kabupaten Bombana	Sulawesi Tenggara	40
242.	DPRD Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan	40
243.	DPRD Kabupaten Bone Bolango	Gorontalo	40
244.	DPRD Kabupaten Boven Digoel	Papua	40
245.	DPRD Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara	40
246.	DPRD Kabupaten Gunungkidul	Daerah Istimewa Yogyakarta	40
247.	DPRD Kabupaten Halmahera Barat	Maluku Utara	40
248.	DPRD Kabupaten Halmahera Timur	Maluku Utara	40
249.	DPRD Kabupaten Indragiri Hilir	Riau	40
250.	DPRD Kabupaten Jayapura	Papua	40
251.	DPRD Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat	40
252.	DPRD Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur	40
253.	DPRD Kabupaten Maluku Tenggara	Maluku	40

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
254.	DPRD Kabupaten Manokwari Selatan	Papua Barat	40
255.	DPRD Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah	40
256.	DPRD Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	40
257.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	40
258.	DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	40
259.	DPRD Kabupaten Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	40
260.	DPRD Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan	40
261.	DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Lampung	40
262.	DPRD Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan	40
263.	DPRD Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara	40
264.	DPRD Kabupaten Agam	Sumatera Barat	39
265.	DPRD Kabupaten Alor	Nusa Tenggara Timur	39
266.	DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah	39
267.	DPRD Kabupaten Banggai Laut	Sulawesi Tengah	39
268.	DPRD Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan	39
269.	DPRD Kabupaten Bantaeng	Sulawesi Selatan	39
270.	DPRD Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Selatan	39
271.	DPRD Kabupaten Barito Timur	Kalimantan Tengah	39
272.	DPRD Kabupaten Buru	Maluku	39
273.	DPRD Kabupaten Buton Selatan	Sulawesi Tenggara	39
274.	DPRD Kabupaten Buton Tengah	Sulawesi Tenggara	39
275.	DPRD Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara	39
276.	DPRD Kabupaten Jeneponto	Sulawesi Selatan	39
277.	DPRD Kabupaten Kaimana	Papua Barat	39
278.	DPRD Kabupaten Kampar	Riau	39
279.	DPRD Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah	39
280.	DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	39
281.	DPRD Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah	39
282.	DPRD Kabupaten Karimun	Kepulauan Riau	39
283.	DPRD Kabupaten Karo	Sumatera Utara	39
284.	DPRD Kabupaten Katingan	Kalimantan Tengah	39
285.	DPRD Kabupaten Kaur	Bengkulu	39
286.	DPRD Kabupaten Keerom	Papua	39

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
287.	DPRD Kabupaten Kendal	Jawa Tengah	39
288.	DPRD Kabupaten Kepulauan Aru	Maluku	39
289.	DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	39
290.	DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe	Sulawesi Utara	39
291.	DPRD Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	39
292.	DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	39
293.	DPRD Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur	39
294.	DPRD Kabupaten Kutai Timur	Kalimantan Timur	39
295.	DPRD Kabupaten Labuhanbatu	Sumatera Utara	39
296.	DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	39
297.	DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	39
298.	DPRD Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan	39
299.	DPRD Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah	39
300.	DPRD Kabupaten Lampung Selatan	Lampung	39
301.	DPRD Kabupaten Lampung Timur	Lampung	39
302.	DPRD Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	39
303.	DPRD Kabupaten Manggarai	Nusa Tenggara Timur	39
304.	DPRD Kabupaten Mimika	Papua	39
305.	DPRD Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	39
306.	DPRD Kabupaten Siak	Riau	39
307.	DPRD Kabupaten Sijunjung	Sumatera Barat	39
308.	DPRD Kabupaten Sikka	Nusa Tenggara Timur	39
309.	DPRD Kabupaten Simalungun	Sumatera Utara	39
310.	DPRD Kabupaten Sinjai	Sulawesi Selatan	39
311.	DPRD Kabupaten Sintang	Kalimantan Barat	39
312.	DPRD Kabupaten Asmat	Papua	38
313.	DPRD Kabupaten Banggai	Sulawesi Tengah	38
314.	DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	38
315.	DPRD Kabupaten Kepulauan Sula	Maluku Utara	38
316.	DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	38
317.	DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Maluku	38
318.	DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua	38
319.	DPRD Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat	38

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
320.	DPRD Kabupaten Kolaka	Sulawesi Tenggara	38
321.	DPRD Kabupaten Kolaka Timur	Sulawesi Tenggara	38
322.	DPRD Kabupaten Kolaka Utara	Sulawesi Tenggara	38
323.	DPRD Kabupaten Konawe	Sulawesi Tenggara	38
324.	DPRD Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara	38
325.	DPRD Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara	38
326.	DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	38
327.	DPRD Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat	38
328.	DPRD Kabupaten Lebong	Bengkulu	38
329.	DPRD Kabupaten Lembata	Nusa Tenggara Timur	38
330.	DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	38
331.	DPRD Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	38
332.	DPRD Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan	38
333.	DPRD Kabupaten Malaka	Nusa Tenggara Timur	38
334.	DPRD Kabupaten Malinau	Kalimantan Utara	38
335.	DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku	38
336.	DPRD Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	38
337.	DPRD Kabupaten Mamasa	Sulawesi Barat	38
338.	DPRD Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat	38
339.	DPRD Kabupaten Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	38
340.	DPRD Kabupaten Mandailing Natal	Sumatera Utara	38
341.	DPRD Kabupaten Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	38
342.	DPRD Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan	38
343.	DPRD Kabupaten Melawi	Kalimantan Barat	38
344.	DPRD Kabupaten Mempawah	Kalimantan Barat	38
345.	DPRD Kabupaten Merangin	Jambi	38
346.	DPRD Kabupaten Merauke	Papua	38
347.	DPRD Kabupaten Ngada	Nusa Tenggara Timur	38
348.	DPRD Kabupaten Parigi Moutong	Sulawesi Tengah	38
349.	DPRD Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	38
350.	DPRD Kabupaten Pasangkayu	Sulawesi Barat	38
351.	DPRD Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah	38
352.	DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara	Kalimantan Timur	38

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
353.	DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Sumatera Selatan	38
354.	DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	38
355.	DPRD Kabupaten Pinrang	Sulawesi Selatan	38
356.	DPRD Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat	38
357.	DPRD Kabupaten Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	38
358.	DPRD Kabupaten Sarmi	Papua	38
359.	DPRD Kabupaten Luwu	Sulawesi Selatan	37
360.	DPRD Kabupaten Majene	Sulawesi Barat	37
361.	DPRD Kabupaten Minahasa	Sulawesi Utara	37
362.	DPRD Kabupaten Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	37
363.	DPRD Kabupaten Minahasa Utara	Sulawesi Utara	37
364.	DPRD Kabupaten Muaro Jambi	Jambi	37
365.	DPRD Kabupaten Muna	Sulawesi Tenggara	37
366.	DPRD Kabupaten Muna Barat	Sulawesi Tenggara	37
367.	DPRD Kabupaten Musi Rawas	Sumatera Selatan	37
368.	DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara	Sumatera Selatan	37
369.	DPRD Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	37
370.	DPRD Kabupaten Natuna	Kepulauan Riau	37
371.	DPRD Kabupaten Takalar	Sulawesi Selatan	37
372.	DPRD Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan	37
373.	DPRD Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	37
374.	DPRD Kabupaten Tangerang	Banten	37
375.	DPRD Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	37
376.	DPRD Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Utara	36
377.	DPRD Kabupaten Tanggamus	Lampung	36
378.	DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi	36
379.	DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	36
380.	DPRD Kabupaten Tapanuli Utara	Sumatera Utara	36
381.	DPRD Kabupaten Tebo	Jambi	36
382.	DPRD Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	36
383.	DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	31
384.	DPRD Kabupaten Pahuwato	Gorontalo	30

X. DPRD KOTA

No.	Nama Instansi		Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	DPRD Kota Batam	Kepulauan Riau	83
2.	DPRD Kota Bandung	Jawa Barat	77
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
3.	DPRD Kota Sukabumi	Jawa Barat	67
4.	DPRD Kota Bogor	Jawa Barat	66
5.	DPRD Kota Surakarta	Jawa Tengah	65
6.	DPRD Kota Dumai	Riau	64
7.	DPRD Kota Banjarmasin	Kalimantan Selatan	63
8.	DPRD Kota Tanjung Balai	Sumatera Utara	62
9.	DPRD Kota Denpasar	Bali	61
10.	DPRD Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	60
11.	DPRD Kota Bontang	Kalimantan Timur	60
12.	DPRD Kota Pangkal Pinang	Kepulauan Bangka Belitung	60
13.	DPRD Kota Metro	Lampung	60
14.	DPRD Kota Tasikmalaya	Jawa Barat	59
15.	DPRD Kota Banda Aceh	Aceh	58
16.	DPRD Kota Langsa	Aceh	58
17.	DPRD Kota Lhokseumawe	Aceh	58
18.	DPRD Kota Sabang	Aceh	58
19.	DPRD Kota Subulussalam	Aceh	58
20.	DPRD Kota Cimahi	Jawa Barat	58
21.	DPRD Kota Malang	Jawa Timur	58
22.	DPRD Kota Mojokerto	Jawa Timur	58
23.	DPRD Kota Pasuruan	Jawa Timur	58
24.	DPRD Kota Probolinggo	Jawa Timur	58
25.	DPRD Kota Surabaya	Jawa Timur	58
26.	DPRD Kota Batu	Jawa Timur	57
27.	DPRD Kota Blitar	Jawa Timur	57
28.	DPRD Kota Kediri	Jawa Timur	57
29.	DPRD Kota Madiun	Jawa Timur	57
30.	DPRD Kota Depok	Jawa Barat	56

No.	Nama Instansi		Nilai
31.	DPRD Kota Semarang	Jawa Tengah	54
32.	DPRD Kota Tegal	Jawa Tengah	52
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
33.	DPRD Kota Tangerang Selatan	Banten	50
34.	DPRD Kota Banjar	Jawa Barat	50
35.	DPRD Kota Bekasi	Jawa Barat	50
36.	DPRD Kota Bandar Lampung	Lampung	50
37.	DPRD Kota Ambon	Maluku	48
38.	DPRD Kota Bima	Nusa Tenggara Barat	48
39.	DPRD Kota Bau Bau	Sulawesi Tenggara	48
40.	DPRD Kota Serang	Banten	46
41.	DPRD Kota Magelang	Jawa Tengah	46
42.	DPRD Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	46
43.	DPRD Kota Bengkulu	Bengkulu	42
44.	DPRD Kota Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta	42
45.	DPRD Kota Gorontalo	Gorontalo	42
46.	DPRD Kota Jambi	Jambi	42
47.	DPRD Kota Sungai Penuh	Jambi	42
48.	DPRD Kota Bukit Tinggi	Sumatera Barat	42
49.	DPRD Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	42
50.	DPRD Kota Lubuk Linggau	Sumatera Selatan	42
51.	DPRD Kota Pagar Alam	Sumatera Selatan	42
52.	DPRD Kota Tangerang	Banten	41
53.	DPRD Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	41
54.	DPRD Kota Kupang	Nusa Tenggara Timur	41
55.	DPRD Kota Sorong	Papua Barat	41
56.	DPRD Kota Bitung	Sulawesi Utara	41
57.	DPRD Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara	41
58.	DPRD Kota Manado	Sulawesi Utara	41
59.	DPRD Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	41
60.	DPRD Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	41
61.	DPRD Kota Solok	Sumatera Barat	41
62.	DPRD Kota Pekalongan	Jawa Tengah	40

No.	Nama Instansi		Nilai
63.	DPRD Kota Salatiga	Jawa Tengah	40
64.	DPRD Kota Singkawang	Kalimantan Barat	40
65.	DPRD Kota Tarakan	Kalimantan Utara	40
66.	DPRD Kota Padang	Sumatera Barat	40
67.	DPRD Kota Pariaman	Sumatera Barat	40
68.	DPRD Kota Tebing Tinggi	Sumatera Utara	40
69.	DPRD Kota Cilegon	Banten	39
70.	DPRD Kota Pontianak	Kalimantan Barat	39
71.	DPRD Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	39
72.	DPRD Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara	39
73.	DPRD Kota Tomohon	Sulawesi Utara	39
74.	DPRD Kota Padang Sidempuan	Sumatera Utara	39
75.	DPRD Kota Pematangsiantar	Sumatera Utara	39
76.	DPRD Kota Sibolga	Sumatera Utara	39
77.	DPRD Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	38
78.	DPRD Kota Samarinda	Kalimantan Timur	38
79.	DPRD Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	38
80.	DPRD Kota Pekanbaru	Riau	38
81.	DPRD Kota Makassar	Sulawesi Selatan	38
82.	DPRD Kota Palopo	Sulawesi Selatan	38
83.	DPRD Kota Pare Pare	Sulawesi Selatan	38
84.	DPRD Kota Palu	Sulawesi Tengah	38
85.	DPRD Kota Tual	Maluku	37
86.	DPRD Kota Ternate	Maluku Utara	37
87.	DPRD Kota Palembang	Sumatera Selatan	37
88.	DPRD Kota Prabumulih	Sumatera Selatan	37
89.	DPRD Kota Binjai	Sumatera Utara	36
90.	DPRD Kota Gunungsitoli	Sumatera Utara	36
91.	DPRD Kota Medan	Sumatera Utara	36

XI. PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

No.	Nama Instansi	Provinsi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)			
1.	Universitas Pamulang	Banten	78
2.	Universitas Tidar	Jawa Tengah	77
3.	Universitas Bandar Lampung	Lampung	76
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)			
4.	Universitas Pasir Pengaraian	Riau	64
5.	Universitas Pancasakti Tegal	Jawa Tengah	64
6.	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat	64
7.	Universitas Lampung	Lampung	63
8.	Universitas Yarsi	DKI Jakarta	62
9.	Universitas Muhammadiyah Kotabumi	Lampung	61
10.	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	DKI Jakarta	60
11.	Universitas Muhammadiyah Metro	Lampung	59
12.	Universitas Sam Ratulangi	Sulawesi Utara	59
13.	Universitas Lancang Kuning	Riau	58
Kategori TRI BUNTARA (Nilai 26 s.d. 50)			
14.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai	Kalimantan Tengah	50
15.	Universitas Balikpapan	Kalimantan Timur	42
16.	Universitas Pancasila	DKI Jakarta	41
17.	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	Kalimantan Timur	41
18.	Universitas Sumatera Utara	Sumatera Utara	31
19.	Universitas Khairun	Maluku Utara	30
20.	Universitas Pendidikan Ganesha	Bali	28

XII. UNIT ESELON I KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	85
2.	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	81
3.	Direktorat Jenderal Imigrasi	76

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori DWI TUNGGGA (Nilai 51 s.d. 75)		
4.	Inspektorat Jenderal	72
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	71
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	71
7.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	69
8.	Sekretariat Jenderal	65
9.	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	64
10.	Direktorat Jenderal Pasyarakatan	60

XIII. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori EKA ACALAPATI (Nilai 76 s.d. 100)		
1.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	90
2.	Kantor Wilayah DKI Jakarta	88
3.	Kantor Wilayah Kalimantan Timur	87
4.	Kantor Wilayah Riau	87
5.	Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	86
6.	Kantor Wilayah Sulawesi Selatan	86
7.	Kantor Wilayah Jawa Timur	85
8.	Kantor Wilayah Bengkulu	84
9.	Kantor Wilayah Jawa Barat	84
10.	Kantor Wilayah Jawa Tengah	84
11.	Kantor Wilayah Maluku Utara	84
12.	Kantor Wilayah Sulawesi Barat	84
13.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	84
14.	Kantor Wilayah Banten	83
15.	Kantor Wilayah Jambi	83
16.	Kantor Wilayah Kalimantan Barat	83
17.	Kantor Wilayah Lampung	83
18.	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	83
19.	Kantor Wilayah Maluku	82
20.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur	82

No.	Nama Instansi	Nilai
21.	Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara	82
22.	Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat	81
23.	Kantor Wilayah Aceh	80
24.	Kantor Wilayah Bali	80
25.	Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	80
26.	Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	80
27.	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	80
28.	Kantor Wilayah Papua Barat	79
29.	Kantor Wilayah Sulawesi Tengah	78
30.	Kantor Wilayah Sumatera Barat	78
31.	Kantor Wilayah Gorontalo	77
32.	Kantor Wilayah Papua	77
33.	Kantor Wilayah Sumatera Utara	77

XIV. UPT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Nama Instansi	Nilai
Kategori DWI TUNGGU (Nilai 51 s.d. 75)		
1.	Politeknik Imigrasi	55
2.	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	54
3.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	53

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY